

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan fenomena modern. Ini menyebabkan peran Pendidikan kewirausahaan saat ini menjadi strategis. Kemajuan, ketahanan, dan daya saing sebuah negara pada era global ditentukan oleh jumlah entrepreneur yang dimiliki oleh negara tersebut. Hasil kajian beberapa ahli, sejalan dengan fenomena yang tumbuh di Indonesia di berbagai level pendidikan yang ditawarkan, yang memasukkan atau mencantumkan pendidikan kewirausahaan dalam setiap kurikulum pendidikannya, dengan harapan agar setiap lulusan memiliki bekal *enterepreneurship* atau berjiwa *entrepreneurial*. Para lulusan ini diharapkan menjadi sumber daya manusia yang mampu survive dan memiliki daya saing dalam lingkungan global yang kompetitif dan turbulen di era ekonomi pengetahuan. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan kewirausahaan di Indonesia mendorong anek inovasi dalam penyelenggaraannya (Purnomo, 2015).

Dalam dunia pendidikan, Universitas menjadi tempat untuk mencetak lulusan-lulusan yang memiliki *hardskill* dan *softskill* mumpuni. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh tiap lulusan, yaitu kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib yang harus diikuti para mahasiswa-mahasiswi dengan tujuan agar mereka dapat menciptakan lapangan kerja dengan usaha yang mereka rintis (Anastasya dan Sukmayadi, 2023). Mata kuliah Kewirausahaan merupakan mata kuliah yang melatih mahasiswa untuk peka melihat peluang baik dalam dunia bisnis maupun dalam perspektif bidang ilmu yang lain. Pada mata kuliah kewirausahaan mahasiswa dibekali dengan karakter kreatif dan inovatif baik dalam bentuk *softskill* maupun *hardskill*. Mata kuliah kewirausahaan merupakan sarana untuk menjadikan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mempunyai kesadaran untuk mengembangkan potensi diri menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi yang professional. Keterbatasan lapangan kerja dapat diatasi dengan pendidikan kewirausahaan. Diharapkan Pendidikan kewirausahaan mampu mengubah pola pikir mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja sendiri (Hairunisyah, 2021).

Mahasiswa kedokteran hewan diharuskan menghabiskan banyak waktu di berbagai praktik kedokteran hewan dan rumah sakit untuk mendapatkan pengalaman klinis praktis. Kewirausahaan saat ini masih belum menjadi komponen wajib dalam program gelar kedokteran hewan. Akibatnya, beberapa lulusan kedokteran hewan masih belum cukup siap untuk menciptakan bisnis baru, manajemen, atau kepemimpinan yang efektif (Bachynsky et al., 2013). Hal ini terjadi meskipun sebagian besar dari mereka akan bekerja atau memimpin UKM (usaha kecil dan menengah) dalam bentuk praktik dokter pada tahap tertentu dalam karier mereka (Henry, 2023). Selain mahaman mendalam tentang aspek ilmiah dan klinis, mahasiswa ga perlu memahami unsur hukum, etika, dan sosial dalam praktik Jadi, keterampilan komunikasi dan interpersonal, perilaku yang an profesional, serta pemahaman mengenai konteks bisnis praktik ni diakui sebagai bidang penting yang harus dimasukkan ke dalam hewan (Jena, 2020).



Salah satu variabel penting dan menentukan upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah kualitas kurikulum. Rumusan kurikulum yang berkualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan. Tuntutan kualitas pendidikan merupakan tantangan dalam meramu kualitas kurikulum (Kaimuddin, 2015). Oleh karena itu, penulis ingin memetakan kurikulum kewirausahaan dan ekonomi veteriner untuk membantu mengidentifikasi kurikulum pembelajaran kewirausahaan dan ekonomi veteriner di perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan dan kurikulum merupakan dua hal yang saling berkaitan.

1.2 Teori

1.2.1 Definisi dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan kewirausahaan memiliki sifat yang beragam, sehingga konsepnya dasar pendefinisian menjadi kurang unik dikarenakan banyak interpretasi dari beberapa penulis. Beberapa definisi telah diberikan oleh para peneliti dan penulis berdasarkan maksud dan tujuan mereka untuk mengorientasikan dan mengklasifikasikan pendidikan semacam ini. Pendidikan kewirausahaan telah diakui sebagai tonggak penting dalam sistem pendidikan kontemporer. Pendidikan kewirausahaan merupakan serangkaian upaya pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan formal. Upaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta dalam berperilaku wirausaha atau mempengaruhi keinginan tersebut (Brakaj dan Safrankova, 2024). Pendidikan kewirausahaan dikaitkan dengan pengembangan keterampilan kreatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, pola pikir kewirausahaan telah diakui memberikan keberhasilan dan kegagalan di kalangan wirausahawan dalam penelitian kewirausahaan (Jiatong et al., 2021). Sementara menurut Dewi et al. (2023), Pengertian kewirausahaan berasal dari kata dasar Wira yang berarti ksatria, pahlawan, pendekar, unggul, pemberani. Sedangkan kata Bisnis berarti bekerja, melakukan sesuatu. Oleh karena itu, mendefinisikan kewirausahaan dalam arti sebenarnya sangatlah sulit. seseorang yang melakukan sesuatu. Pengertian kewirausahaan ada banyak sekali, namun secara umum hakikatnya hampir sama, yaitu sifat, kepribadian dan sifat yang melekat pada diri seseorang yang selalu bercita-cita untuk mewujudkan ide-ide inovatif secara nyata dan dapat mengembangkannya secara berkelanjutan.

Tujuan pendidikan kewirausahaan adalah untuk membekali lulusan dengan keterampilan dan pola pikir yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan perekonomian mereka. Hal ini termasuk memupuk kreativitas dan inovasi, serta mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang dengan mendirikan usaha baru. Mengingat pendidikan kewirausahaan mencakup lebih dari sekedar mendidik masyarakat tentang cara memulai bisnis, hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi peluang dan



ampilan berpikir inovatif dan kritis (Brakaj dan Safrankova, 2024). Dewi et al. (2023), bahwa pelaksanaan program mata kuliah merupakan inti dalam membentuk minat berwirausaha mahasiswa. Jika mata kuliah kewirausahaan akan terbentuk karakter mahasiswa yang aktif, tanggung jawab dan kreatif. Jadi untuk menambah minat berwirausaha yang difokuskan pada materi saja, akan tetapi minat berwirausaha bisa tumbuh melalui praktek. Didukung oleh Bazkiaei et al. (2020),

mengatakan bahwa keikutsertaan dalam program kewirausahaan membuat mahasiswa memiliki keinginan untuk memulai usaha sendiri, sehingga mendorong mereka untuk memikirkan rencana bisnis.

1.2.2 Kewirausahaan dalam Pendidikan Kedokteran Hewan

Kedokteran hewan, bidang upaya ilmiah yang berkembang pesat, melibatkan studi, diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit pada hewan baik sebagai individu maupun kelompok. Peran profesi dokter hewan telah diperluas dalam beberapa tahun terakhir hingga mencakup keterlibatan yang lebih besar dalam hewan produksi, kesehatan masyarakat, kebersihan makanan dan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan beragam spesies seperti hewan laboratorium, koleksi zoologi dan satwa liar. Bisnis kedokteran hewan, secara tradisional, dicirikan oleh praktik swasta yang kecil dan independen, yang sebagian besar dijalankan oleh pemilik. Kedokteran hewan telah terbukti menjadi arena yang sangat berwirausaha, sehingga menghasilkan peluang yang adil. Bagian dari penemuan penelitian ilmiah yang mengarah pada pengembangan produk dan proses baru selama beberapa dekade. Dengan demikian, kebutuhan dan manfaat potensial dari memasukkan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum kedokteran hewan dapat diapresiasi (Hendry dan Treanor, 2012).

Pendidikan kewirausahaan memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan niat berwirausaha individu. Pendidikan kewirausahaan menumbuhkan pola pikir terkait usaha di kalangan siswa, memfasilitasi mereka masuk ke dalam domain kewirausahaan. Menumbuhkan pola pikir seperti ini dan menumbuhkan keterampilan dan sikap yang diperlukan dapat mendukung dan mendorong niat berwirausaha (Brakaj dan Safrankova, 2024). Sebagian besar mahasiswa kedokteran hewan memilih Pendidikan kedokteran hewan karena kecintaannya terhadap hewan. Namun, dokter hewan bekerja pada bidang dimana mereka terus berinteraksi tidak hanya dengan hewan tetapi juga dengan klien. Oleh karena itu, keterampilan berbisnis dan kewirausahaan menjadi persyaratan yang sangat diperlukan bagi dokter hewan saat ini (Sipahi et al., 2024).

1.2.3 Definisi dan Implementasi Ekonomi Veteriner dalam Kurikulum

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyatakan bahwa kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan. Menurut Nadhir (2017), yang dikutip dari buku Mills and Gillson(1999), mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep



ekonomi dalam sektor kesehatan. Ekonomi kesehatan berhubungan dengan alokasi sumber daya diantara berbagai upaya kesehatan, yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, pengorganisasian berbagai pelayanan kesehatan, efisiensi pengalokasian dan penggunaan sumber daya, dan dampak upaya pencegahan, pengobatan dan perawatan pada individu dan masyarakat.

Kedokteran hewan, bagian penting dari ilmu berkomitmen untuk melatih

bakat profesional tingkat lanjut yang mampu menangani produksi ternak, pencegahan dan pengobatan penyakit hewan, dan perawatan kesehatan hewan. Menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan konservasi ekologi, meningkatkan kapasitas pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Implementasi kurikulum di jurusan Kedokteran Hewan berdasarkan konsep ideologis mata kuliah. Dengan menerapkan empat prinsip utama: berorientasi pada tujuan, berpusat pada siswa, aplikasi praktis, dan umpan balik berkelanjutan, integrasi organik pendidikan profesional (Ma, 2024).

1.2.4 Metode Pemetaan Kurikulum

Kurikulum memiliki kedudukan strategis dan sentral dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Kurikulum menjadi acuan dalam menata dan mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan (Kaimuddin, 2015). Pemetaan kurikulum merupakan pertimbangan tentang kapan, bagaimana, dan apa yang diajarkan, serta ukuran penilaian yang digunakan untuk menjelaskan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa yang diharapkan (Plaza et al., 2007). Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pemetaan kurikulum adalah pendekatan berbasis bukti yang mendorong kolaborasi fakultas dan jaminan kualitas. Pendekatan ini juga disebut sebagai kurikulum crosswalk, panduan kecepatan, atau ruang lingkup dan urutan (Neville-Norton dan Cantwell, 2019).

Kompetensi budaya ditemukan dalam kurikulum namun, sebagian besar tersembunyi dan guru melaporkan cakupan yang lebih luas daripada siswa. Metode pemetaan *triangulasi* menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum saat ini dan menginformasikan perubahan untuk kurikulum masa depan. Porter menjabarkan sebuah metode untuk mengukur konten instruksi, materi instruksional, dan keselarasan di antara keduanya, dengan fokus pada kurikulum yang disampaikan atau ditetapkan. Ia menyarankan bahwa ukuran konten instruksional yang baik dapat digunakan untuk mendeskripsikan kurikulum yang diajarkan atau untuk mengukur sejauh mana kurikulum baru telah diimplementasikan (Plaza et al., 2007).

1.2.5 Rancangan Pembelajaran

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas adalah memformulasikan kurikulum yang berkualitas dengan melakukan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Rangkaian Undang-Undang dan Peraturan Presiden ini merupakan landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pembelajaran Semester) adalah dokumen program pembelajaran k menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL (ran Lulusan) yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri suaian dengan konsep kurikulumnya (Ahmad, 2016). RPS disusun pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada tai perangkat pembelajaran lainnya diantaranya: rencana tugas, dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain

(Jurnaidi et al., 2020). CPL yang di bebaskan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes*. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ahmad, 2016).

1.2.6 Kompetensi dan Standar Kompetensi menurut PDHI, SKKNI dan OIE

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh lulusan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Sobirin, 2020). Kompetensi dilihat dari kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan oleh organisasi. Kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang terbatas (Nashihuddin et al., 2020).

Berdasarkan pada arti bahasa, standar kompetensi kerja terbentuk atas kata standar dan kompetensi kerja. Standar diartikan sebagai “ukuran” tertentu yang disepakati dipakai sebagai patokan, sedangkan kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai untuk profesionalitas seseorang. Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan untuk kerja yang dipersyaratkan (Lumempow et al., 2018). Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur (Sobirin, 2020). Mahasiswa yang akan lulus idealnya dan diharapkan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan universitas (Nashihuddin et al., 2020). Ditegaskan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 5 Ayat 1 bahwa “Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan” (Kemenristekdikti, 2014).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan (Falakh, 2022). SKKNI nantinya akan diunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kurikulum pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi sampai dengan elajarannya, untuk proses pembelajaran pada lembaga serta digunakan pula sebagai acuan untuk menyusun materi uji lembaga sertifikasi profesi (LPS). Dengan konsep tersebut, lembaga pendidikan/pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan dan akan dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui ujian (Lumempow et al., 2018).



Sejak diterbitkannya PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, telah diadakan pertemuan antara seluruh Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia dengan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) dalam membahas kompetensi dokter hewan yang perlu di hasilkan oleh Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Indonesia (PTKHI) sesuai dengan tuntutan dan harapan PB PDHI mengenai tantangan global. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter hewan adalah penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan berdasarkan kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh PDHI pada tahun 2000 dan diperbarui tahun 2007 (PDHI, 2013).

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH, didirikan sebagai OIE) adalah organisasi antarpemerintah dengan misi untuk meningkatkan kesehatan hewan di seluruh dunia (Thompson et al.,2024). Dokter hewan di setiap negara bertanggung jawab atas pemberian Layanan Veteriner Nasional, yaitu layanan yang diberikan berdasarkan kerangka legislatif dan naungan otoritas pemerintah suatu negara untuk menerapkan kesehatan hewan guna menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan, manusia, dan ekosistem. Istilah "Layanan Veteriner" mengacu pada definisi Kode Kesehatan Hewan Terrestrial OIE (Kode Terrestrial), yang mencakup komponen publik dan privat dari profesi veteriner yang terlibat dalam promosi kesehatan hewan dan publik serta kesejahteraan hewan. Layanan Veteriner Nasional harus mampu memenuhi standar yang diadopsi oleh masing-masing negara, tetapi juga harus mampu mematuhi standar dan rekomendasi internasional yang sesuai, khususnya yang ada dalam Kode Terrestrial OIE. Dalam memberikan Layanan Veteriner Nasional, dokter hewan berperan sebagai mitra integral dalam upaya "*one health*" yang merupakan kolaborasi berbagai disiplin ilmu yang bekerja secara lokal, nasional, dan global, untuk mengatasi tantangan kritis dan mencapai kesehatan optimal bagi manusia, hewan (domestik dan liar) dan lingkungan (OIE, 2012).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat kesenjangan kurikulum pembelajaran pendidikan kewirausahaan dan ekonomi veteriner pada perguruan tinggi di Indonesia.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi keberagaman kurikulum kewirausahaan dan ekonomi veteriner pada perguruan tinggi kedokteran hewan di tingkat universitas yang ada di Indonesia.



tian

penelitian untuk memberikan informasi yang diharapkan berguna dalam peningkatan kurikulum kewirausahaan di bidang kedokteran litas pendidikan lebih merata dan dapat menghasilkan lulusan yang si tantangan dunia kerja dan industri.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Maret-Mei 2025. Penelitian menggunakan data kurikulum dan RPS serta SKS sebagai penunjang dalam penelitian mata kuliah Kewirausahaan dan Ekonomi Veteriner dari setiap Universitas di Indonesia yang memiliki Pendidikan Kedokteran Hewan.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu laptop, *Microsoft word*, *Microsoft excel* dan *handphone*.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu website universitas terkait, buku panduan akademik, data kompetensi OIE, PDHI, SKKNI dan RPS mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi veteriner.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi dokumen untuk menganalisa data yang diperlukan. Sehingga memerlukan data dokumen berupa kurikulum serta RPS yang terkait dengan mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi veteriner dari setiap universitas yang masuk dalam organisasi PDHI. Mengelompokkan setiap universitas untuk mengetahui jumlah SKS mata kuliah, profil lulusan, CPL yang terkait dengan Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Veteriner. Hal ini dilakukan untuk lebih mengerucutkan dan sebagai penunjang data universitas yang akan dibahas lebih lanjut terkait RPS mata kuliahnya. Pemetaan ini dilakukan dengan memfokuskan pada RPS mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi veteriner tepatnya pada materi pembelajarannya kemudian dihubungkan dengan standar kompetensi yang dikeluarkan oleh SKKNI, PDHI dan OIE.

2.4 Pelaksanaan Penelitian

Penyebaran surat izin penelitian dan surat permohonan data kepada 13 universitas dilakukan dengan daring melalui *e-mail* universitas terkait serta offline pada universitas yang dapat di jangkau dengan mudah. Penelitian juga dilakukan dengan mengakses web universitas untuk mendapatkan data berupa buku panduan akademik. Ada pula



berupa RPS dengan menghubungi secara pribadi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah terkait sebagai opsi kedua. Waktu untuk mengumpulkan data diperkirakan 2 bulan. Selama proses berlangsung. Adapun Tantangan dari penelitian ini yakni dari 13 universitas hanya 2 universitas yang membalas *e-mail* terkait surat izin permohonan data. Pada akses data secara online juga memiliki kendala tidak dapat web dari beberapa universitas yang error sehingga data

terkait tidak dapat di akses dengan baik. Sementara pengumpulan data RPS dengan opsi kedua yakni menghubungi mahasiswa dari universitas terkait untuk meminta akses RPS hanya mendapatkan 7 data RPS diantaranya 5 data RPS kewirausahaan dan 2 data RPS ekonomi veteriner.



Optimized using
trial version
www.balesio.com